

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN  
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA  
MEMBAKAR HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*(Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)*

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**BAYU CUAN**

**NIM. 14160013**



**PROGRAM STUDY JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bayu Cuan  
Nim / Prodi : 14160013 / Jinayah (Pidana Islam)  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018  
Saya yang menyatakan,



Bayu Cuan  
Nim. 14160013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bayu Cuan  
Nim / Program Studi : 14160013 / Jinayah (Pidana Islam)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan  
Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Study  
Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kab. OKI*)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 16 Juni 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
NIP. 19671210 198603 1004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bayu Cuan

Nim / Program Studi : 14160013 / Jinayah (Pidana Islam)

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan  
Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Study Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal  
Kab. OKI)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2018

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH. MH.  
NIP. 19680113 1994032003

Pembimbing Kedua

Jumamah, SH. MH.  
NIP. 19691031 2014112001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

Formulir E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bayu Cuan  
Nim/Jurusan : 14160013 / Jinayah (Pidana Islam)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku  
Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar  
Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Study Kasus Desa  
Talang Rimba Kecamatan Cengal Kab. OKI*)

Telah diterima dalam ujian Munaqasyah pada tanggal 06 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 3 Juli 2018	Pembimbing utama	: Yuswalin, SH. MH. t.t. :
Tanggal 26 Juni 2019	Pembimbing kedua	: Jumanah, SH. MH. t.t. :
Tanggal 26 Juni 2018	Penguji utama	: Dr. Paisol Burhan, M.Hum t.t. :
Tanggal 3 Juli 2019	Penguji kedua	: Romziat Sa'adah, SH. M.Hum t.t. :
Tanggal 3 Juli 2018	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M. Ag t.t. :
Tanggal 28 Juni 2019	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I t.t. :



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon izin penjiilidan skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Bayu Cuan  
NIM/Program studi : 14160013 / Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan  
Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Study Kasus Desa  
Talang Rimba Kecamatan Cengal Kab. OKI*)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan  
dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut  
untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum  
NIP. 19650611200001002

Palembang, Juni 2018  
Penguji Kedua

Romziatussa'adah, SH. M.Hum  
NIP. 196703202001122001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A  
NIP. 19620706 199003 1 004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*"Yesterday Is History  
Tomorrow Is A Mystery  
But Today Is A Gift"*

### PERSEMBAHKAN :

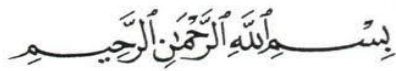
- Ayahanda Dan Ibunda Yang Selalu Mencurahkan Kasih Sayangnya Tiada Henti Serta Memberikan Motivasi Agar Saya Semangat Dalam Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.
- Kakak, Ayukku Dan Seluruh Keluarga Besar Ayahanda Jakfar Semaji Yang Selalu Menyemangati Dan Saling Memaklumi Atas Kelebihan Dan Kekurangan Kita Bersama.
- Untuk Dosen-Dosenku Yang Telah Membantu Dan Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
- Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2014, Sealmamater, Terkhusus Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) Yang Selalu Mengingatkan Akan Pentingnya Arti Dari Persahabatan Semoga Kita Menjadi Orang-Orang Yang Sukses.
- Untuk Seseorang Yang Nanti Akan Bersamaku Baik Suka Dan Dukanya.
- Untuk Organisasi Kebangganku, Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Dan AMPATI (Aliansi

*Mahasiswa Pantai Timur) Semoga Tetap  
Eksis Selalu.*

- *Untuk Nusa, Bangsa, Agama Dan  
Almamaterku Tercinta UIN Raden Fatah  
Palembang.*



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, seta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **Tinjaun Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Study Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari

semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis patut mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Romli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Abdul Hadi M. Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Fatah Hidayat, S. Ag, M. Ag, selaku sekretaris jurusan Jinayah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Yuswalina, SH. MH. Selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Jumanah, SH. MH. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

6. Ibu Eti Yusnita, S. Ag., M.H.I. Selaku penasihat akademik yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Terkhusus untuk Ayahanda (Jakfar Semaji) dan Ibunda (Cikmumbai) yang selalu membimbing, memberikan do'a, serta kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya.
9. Sasudara-saudariku yang tercinta selalu membuat semangat dan menjadi penyejuk hati bagi penulis.
10. Seluruh kerabat dan keluarga, yang talah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.
11. Seluruh sahabat-sahabatku yang berasal dari Kecamatan Cengal dan Wilayah Pantai Timur OKI yang kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
12. Teman-teman seperjuangan Program Study Jinayah Angkatan 2014.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 156  
di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim  
Provinsi Sumatera Selatan.

14. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam  
penyusunan tugas akhir ini yang tidak penulis sebutkan  
satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama  
kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian  
dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan  
penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

**Palembang, Mei 2018**  
**Hormat saya**

**Bayu Cuan**  
**Nim. 14160013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Fiqh Jinayah dan Macam-macam Jinayah..	21
1. Pengertian Jinayah .....	21
2. Macam-macam Jinayah .....	22
B. Pengertian Penerapan.....	28
C. Pengertian Sanksi Pidana.....	29
D. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana ..	32
E. Pengertian Pembukaan Lahan.....	34
F. Pengertian Perkebunan .....	35
G. Hutan dan Fungsi Hutan .....	38
1. Pengertian Hutan .....	38
2. Fungsi Hutan.....	40
H. Kebakaran Hutan dan Penyebab Kebakaran Hutan .....	40
1. Pengertian Kebakaran Hutan .....	40
2. Penyebab Kebakaran Hutan.....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA TALANG RIMBA**

A. Sejarah Singkat Desa Talang Rimba .....	46
B. Letak Geografis Desa Talang Rimba.....	49
C. Keadaan Penduduk Desa Talang Rimba.....	50
D. Mata Pencanharian Penduduk Desa Talang Rimba.....	51
E. Tingkat Pendidikan dan Agama Penduduk.....	52

### **BAB IV PAMBAHASAN**

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Membakar Hutan.....	59
B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam ( <i>Fiqh Jinayah</i> ) .....	64
C. Sanksi Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan cara Membakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam ( <i>Fiqh Jinayah</i> ).....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 87**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 90**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 91**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi polatransliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan polatransliterasi Arab Latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal BahasaArab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

## C. Vokal Tunggal

VokaltunggaldalambahasaArab :



Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II)  
dan seterusnya

#### D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antar harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> danya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan waw	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

#### E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alifatauya</i>	Ā	a dangaris panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dangaris di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dangaris di atas

قال سبحانه	: <i>qāla subhānaka</i>
صام رمضان	: <i>shāma ramadlāna</i>
رمي	: <i>ramā</i>
فيهما نافع	: <i>fihamanāfi'u</i>
نيكتبون ما يمكرو	: <i>yaktubūn mā yamkurūna</i>
اذ قال يوسف لابي	: <i>izqālayūsuf liabīhi</i>

## F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamman, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasy diddalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

### H. Kata Sandang

Di ikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	PolaPenulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*DiikutihurufQomariyah*

Kata sandang yang di ikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	PolaPenulisan
---------	---------------

البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomāru</i>

Catatan: Baik diikutihurufsyamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda (-).

## I. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

### Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*      أومرت = *umirtu*  
الشهداء = *Asy-syuhadā'u*      فأتى بها = *Fa'tībihā*

## J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهال هو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahu wakhair al-rāziqīn</i>

فأوفوالكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna
----------------------	-----------------------------

## ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan maksimal dalam melerang serta penerapan sanksi terhadap perbuatan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Didalam hukum Islam perbuatan kebakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* sehingga aturan mengenai sanksi hukuman terhadap pelakunya sudah diatur didalamnya. Penulisan skripsi ini terdapat tiga permasalahan yaitu: Apakah faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan yang suatu penelitian yang bertujuan melakukan study yang mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa sehingga menggambarkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial.

Sehingga dapat diambil kesimpulan ada dua faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar yaitu faktor ekonomi dan faktor sarana prasarana. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan telah diatur dalam UU PPLH mulai dari sarana penegakan hukum administrasi, sarana penegakan hukum perdata serta sarana penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam hukum islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) yang dalam hal ini adalah Hakim.

**Kata Kunci:** Kebakaran Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jarimah Ta'zir*.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya negara kesatuan republik inndonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensinya dari Pasal 1 Ayat (30) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum<sup>1</sup>

Selain negara hukum Indonesia merupakan negara yang memiliki anugerah kekayaan dari keaneragaman hayati (*biodiversity*), di antaranya hutan dan rawa gambut yang begitu

---

<sup>1</sup>Winarno,2008.*PendidikanKewarganegaraan*, Surakarta : Bumi Aksara. Hlm 116.

luas membentang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan dan rawa gambut merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan dan rawa gambut merupakan sumber hayat hidup orang banyak.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

*“Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.*<sup>3</sup>

Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim yang memiliki laut yang luas, pulau begitu banyak dan perairan yang begitu luas membentang di wilayah Negara Kesatuan Republik

---

<sup>2</sup> Nandika Dodi, 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1

<sup>3</sup> Supriyadi Bambang Eko, 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 68-69



Indonesia. Selain dikenal dengan negara maritim Indonesia juga dikenal dengan negara agraris yang memiliki hutan yang begitu luas bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>4</sup>

Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Yang begitu luas dan setiap tahunnya terjadi terutama di daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Cengal Desa Talang Rimba.

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang

---

<sup>4</sup> Santoso Urip, 2012. *hukum agraria kajian komprehensif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 1

diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan perkebunan karet yang terjadi diwilayah Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan baik dari perusahaan maupun masyarakat khususnya diwilayah Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.<sup>5</sup>

Meskipun sudah banyak Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara dibakar atau membakar hutan salah satunya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 Ayat (1) huruf (h) melarang seseorang untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran

---

<sup>5</sup>Samsul Inosentius, “*Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap*”, Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, hal. 2

hutan, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.

Namun tidak membuat efek jera terhadap pelakunya walaupun sudah banyak aturan-aturan yang melarang perbuatan tersebut sebagai contoh kasus yang terjadi di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI pada tahun 2012 ada warga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, kemudian apinya menjalar ke perkebunan karet warga dan pelaku dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun 2 bulan yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 574/Pid.Sus/2012/PN.KA tanggal 24 Maret 2012 yang mana putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman ringan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Plg dimana Hakim memutus bebas terdakwa atas dalil bahwa lahan yang terbakar tidak mengalami kerusakan, masih subur dan bisa ditanami dengan pohon akasia<sup>6</sup>.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Plg

lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, *Al-Qur'an* menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.

Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiannya (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum [30]:41)<sup>7</sup>

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas, *Al-Qur'an* sudah dengan tegas

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014. Hal : 409

melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Didalam Islam, *Al- Qur'an* sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Araf [7]: 56)<sup>8</sup>

Mengenai ayat ini, Thahir bin ‘Asyur dalam tafsir beliau yang monumental, *At- Tahrir wa At- Tanwir* menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>9</sup> Dalam hukum islam mengenai tindak pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam *Al-Qur'an* maupun *al-Hadist*, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para

---

<sup>8</sup>Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014. Hal : 158

<sup>9</sup>Hamdi Fahmi, 25 September 2012, 09:11 WIB: *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, dalam <http://kalsel.muhammadiyah.org>, diunduh Jum'at, 27 Oktober 2017, pukul 20:15 WIB.

Ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum Islam secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma, qiyas, istidlal, al- masalih al mursalah, istihsan, istishab, dan 'urf*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam hal ini penulis tertarik untukmeneliti dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan judul :  
**“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” (Study Kasus Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi pidana pembukaaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan.

- b. Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penegakan hukum terhadap penerapan sanksi tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) terhadap penerapan sanksi tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### **a. Aspek teoritis**

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang serta menambah wawasan dan pengetahuan khusus kepada penulis sendiri dan pada umumnya untuk orang yang membacanya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.



## **b. Aspek praktis**

Agar dapat dijadikan literatur dalam membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencobamengembangkan dengan didukung oleh buku-buku, skripsi, jurnal, maupun opini yang masih ada bersifat umum, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ipo, tahun 2014 yang berjudul “Kendala Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hutan”.<sup>10</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Erdiansyah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2014 yang berjudul

---

<sup>10</sup> Muhammad Ipo, 2014. “*Kendala Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hutan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

“Implementasi Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau”<sup>11</sup>.

Adapun terkait permasalahan ini memiliki sedikit kesamaan dengan pembahasan permasalahan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ipo dan Jurnal yang ditulis oleh Erdiansyah, S.H., M.H., namun dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan cara melakukan penelitian guna mendapatkan suatu kebenaran yang kongkrit. metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), yang suatu penelitian yang bertujuan melakukan *study* yang mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa sehingga menggambarkan gambaran yang

---

<sup>11</sup>Erdiansyah, 2014. “Implementasi Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Fakultas Hukum Universitas Riau

terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>12</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilapangan yaitu di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI.

## **1. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

### **b. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang konkrit terdiri dari :

- 1) Data Primer adalah hasil wawancara peneliti secara langsung kepada beberapa narasumber

---

<sup>12</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1990), hlm 3.

yaitu masyarakat Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI berserta dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.

- 2) Data Skunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan.<sup>13</sup>*Al-Qur'an, al-Hadits*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Adapaun data skunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu :<sup>14</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain, *Al-Qur'an, al-Hadits*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 13.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Lokasi ini dipilih karena masyarakat disana apabila membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara-cara yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah :

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung untuk memperoleh

keterangan dari responden yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab. Dengan mengajukan pertanyaan untuk di jawab saecara lisan, dimana materi yang akan dipertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman.

Adapun yang akan diwawancarai oleh penulis dalam hal ini yaitu warga Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat desa dan orang-orang yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Adalah Pengumpulan data yang untuk menunjang penulisan dapa berupa data-data tentang hal-hal variabel berupa catatan, buku-buku, dan literatur-literatur, dan sebagainya yangb berkenanaan dengan topik pembahasan. adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar

pada masalah struktur kepengurusan serta biografi maupun latar belakang responden. dengan ini, diharapkan penelitian ini memperoleh data dan gambaran umum objek penelitian.

### 3. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>15</sup> Dalam menggunakan metode ini cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Berkaitan dengan hal diatas, penulis terjun kelapangan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan tentang latar belakang serta faktor-faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbita Fakultas Psikologi UGM, 1984, Hlm 136.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang menggambarkan atau memaparkan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).

#### **5. Analisis Data**

Setelah data yang digunakan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok permasalahan. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-Pernyataan bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam penyampaian penulisan ini maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut :



## **BAB 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini hal-hal yang dibahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang definisi dan penjelasan tentang pengertian *fiqh jinayah*, macam-macam *jinayah*, pengertian penerapan hukum, sanksi pidana, pelaku tindak pidana, pembukaan lahan, perkebunan, hutan, fungsi hutan, pengelolaan hutan, pengertian kebakaran hutan dan sebab-sebab pembakaran hutan.

## **BAB III : Gambaran Umum Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)**

Dalam bab ini memberikan gambaran umum lokasi yang akan diteliti oleh peneliti mulai dari sejarah singkat Desa Talang Rimba, letak geografis Desa Talang Rimba, keadaan penduduk Desa Talang Rimba, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan agama

#### **BAB IV : Pembahasan**

Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan pokok permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran agar apa yang dikaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Fiqh Jinayah* dan Macam-macam *Jinayah*

##### 1. Pengertian *Jinayah*

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *jinayah*, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata *mufrad* yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. menurut istilah *fiqh jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>16</sup>

Menurut Yusuf<sup>17</sup> bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. *Fiqhjinayah* juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terprinci dari *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Tindak krimminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan

---

<sup>16</sup> Mujib. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta. Kalam Mulia, 2008, hlm 141.

<sup>17</sup> Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah*, 2009, Hlm 1.

melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.<sup>18</sup>

## **2. Macam-macam Jinayah**

### **1. Jarimah**

Pengertian *jarimah* menurut bahasa arab جريمة yang artinya: "perbuatan dosa atau perbuatan salah". *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah pengertian

---

<sup>18</sup> Ali, Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006, hlm. 1.

umum, di mana *jarimah* itu disamakan dengan dosa dan mana kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut hukuman mengakibatkan *duniawi* maupun *ukhrowi*.<sup>19</sup>

## 2. Macam-macam *Jarimah*

### A. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya yaitu hukum *had* (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang dominan.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa

---

<sup>19</sup>Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007, hlm. 9.

<sup>20</sup>Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah*, Palembang. 2009, hlm. 5.

digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

*Jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Murtad
2. *Al-Baghyu* (pemberontakan)
3. *Hirabah* (perampokan)
4. Zina
5. *Qazaf* (menuduh zina)
6. Meminum minuman keras atau khamr
7. Mencuri (*Sariqah*)

#### B. *Jarimah Qishas* dan *Diat*

*Jarimah qishas* dan *diat* adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>22</sup> Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007, hlm. 18.

*Jarimahqishas* dan *diat* ini hanya dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :<sup>23</sup>

1. pembunuhan sengaja.
2. pembunuhan menyerupai sengaja.
3. pembunuhan karena kesalahan.
4. penganiayaan sengaja.
5. penganiayaan tidak sengaja.

### C. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimahta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkan di kepada *ulil amri*. Disampingitu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 19.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 20.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada 3 macam, yaitu *had*, *qishas* atau *diat*, dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan dan mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

*Jarimahta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada berupa *had* dan kifikaratnya. Atau kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat sanksi edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari'at*.



Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut "*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*"

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zir* atas perbuatan maksiat.

*Ta'zir* atas perbuatan maksiat yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada *had*.

2. *Ta'zir* Atas Perbuatan Yang Membahayakan Kepentingan

Umum *Ta'zir* perbuatan yang membahayakan kepentingan umum yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman.

3. *Ta'zir* Atas Pelanggaran (*Mukhalafah*). *Ta'zir* atas

pelanggaran (*mukhalafah*) yaitu jenis yang ketiga ini

sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah

Abdul Aziz Amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan;
- c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan harta;
- e. Jarimah *ta'zir* yang dengan kemaslahatan individu,
- f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

## **B. Pengertian Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu

---

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>, di unduh selasa, 16 Februari 2018, pukul 20:30 wib.

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :<sup>26</sup>

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

### **C. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada

---

<sup>26</sup><http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>, di unduh Rabu, 17 Februari 2018, pukul 20:00 WIB.

dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>27</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:<sup>28</sup>

- a. Pidana Pokok
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Pidana kurungan
  - 4. Pidana denda
  - 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pationis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan

---

<sup>27</sup> Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, hlm.8

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuann serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Muladi, 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm.25

#### **D. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>30</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

---

<sup>30</sup>Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :<sup>31</sup>

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)  
Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)  
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)  
Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm:37

melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginankeinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

#### **E. Pengertian Pembukaan Lahan**

Pembukaan lahan merupakan pembersihan lahan dari segala macam bentuk tanaman yang dapat mengganggu tanaman yang di usahakan, baik secara manual, mekanik maupun secara khemis. Persiapan tanah untuk menciptakan keadaan tempat tubuh yang



optimal bagi pertumbuhan tanaman sangat perlu diperhatikan, oleh karena itu pertumbuhan yang optimal suatu jenis tanaman tergantung dari lingkungan fisiknya. Dalam hal ini usaha yang bisa merubah sifat fisik tanah merupakan tempat tumbuh tanaman, tempat cadangan unsur-unsur hara dan air adalah pengolahan tanah.

Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*Landscape*) yang meliputi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan atau areal tanah yang ingin ditanami oleh tanaman yang diinginkan untuk dibudidayakan untuk mendapatkan hasil produksi yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi bagi manusia di muka bumi ini.<sup>32</sup>

## **F. Pengertian Perkebunan**

Perkebunan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,

---

<sup>32</sup><http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/12/landclearingdan.htm>  
1, di unduh rabu, 18 Februari 2018, pukul 20:30 wib.

mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>33</sup> Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, sedangkan tujuan pengelolaan perkebunan adalah:<sup>34</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Meningkatkan penerimaan negara
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara
- d. Menyediakan lapangan kerja
- e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pelaku usaha perkebunan di Indonesia dibedakan atas dua golongan yaitu pekebun dan perusahaan perkebun. Pekebun adalah perorangan yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, atau lebih dikenal

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

<sup>34</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan> di unduh rabu, 18 Februari 2018, pukul 21:30 wib.

dengan perkebunan rakyat. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan berbentuk badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Perbedaan keduanya dapat dilihat sebagai berikut:

Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar
1. Luas lahan relatif sempit 2. Modal lemah 3. Tingkat teknologi tradisional 4. Pengolahan hasil konvensional	1. Luas lahan besar 2. Modal kuat 3. Teknologi maju 4. Pengolahan hasil modern

(Sumber : <https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.com>, di unduh rabu, 21 Februari 2018, pukul 20:30 wib.)

Berdasarkan kemampuan yang dimiliki maka perkebunan besar mampu untuk meningkatkan penghasilan dan keuntungan per hektar dan per satuan tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding perkebunan rakyat. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa perkebunan besar tidak mempunyai kesulitan atau permasalahan, diantaranya :<sup>35</sup>

1. Perkebunan Besar biasanya mempunyai beban bunga yang tinggi dari penanaman modal.

---

<sup>35</sup><https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.com>, di unduh rabu, 21 Februari 2018, pukul 20:30 wib.

2. Perkebunan Besar mempunyai resiko besar terhadap beberapa fluktuasi harga pasaran dunia, sedangkan pemindahan hasil komoditi dari yang satu ke yang lain tidaklah mudah.
3. Perkebunan Besar memerlukan tenaga kerja yang besar dan relatif mahal, meskipun tenaga kerja yang banyak dan murah merupakan salah satu ciri negara tropis, tetapi dalam praktek permasalahan yang timbul cukup banyak karena upah tenaga kerja merupakan masukan yang besar.

Sedangkan perkebunan kecil rakyat mempunyai beberapa kelebihan dibanding perkebunan besar.

1. Perkebunan kecil merupakan usaha yang dijalankan oleh keluarga, termasuk pengadaan kebutuhan pangannya, sehingga penganeekaragaman hasil lebih mudah dilaksanakan dalam waktu yang kritis.
2. Usaha perkebunan memerlukan masukan tenaga kerja yang tinggi dan relatif sedikit memerlukan mesin, sehingga memungkinkan perkebunan diusahakan secara ekonomis dalam bentuk perkebunan kecil tanpa menghadapi kesulitan yang berarti dalam masalah tenaga kerja, karena relatif cukup tersedia dalam keluarga.
3. Bila resiko pemasaran meningkat, gejolak politik meningkat dan upah buruh meningkat, maka perkebunan kecil lebih mampu bertahan dibandingkan perkebunan besar.

## **G. Hutan dan Fungsi Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>36</sup> Hutan, sebagai karunia dan

---

<sup>36</sup>Pasal 1 ayat UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semuakawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk :<sup>37</sup>

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hutan dibagi lagi berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.<sup>38</sup> Sedangkan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>38</sup>Pasal 1 ayat (4) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>39</sup>Pasal 1 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

## **2. Fungsi Hutan**

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah :<sup>40</sup>

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## **H. Kebakaran Hutan dan Penyebab Kebakaran Hutan**

### **1. Pengertian Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan.

Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (7,8,9,10,11)) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Sebagian besar orang menyatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi pada sekarang ini adalah kebakaran kawasan hutan yang terjadi di hutan (baik itu berupa hutan sekunder maupun hutan primer). Namun, hal yang sesungguhnya adalah pembakaran yang sengaja dilakukan baik oleh para peladang atau petani dan oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan.

Pembakaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan si pembakar, sehingga api diharapkan tidak menjalar bebas layaknya seperti kebakaran hutan. Namun, sayangnya luasan areal yang dibakar dengan sengaja terlalu luas dan terkadang tidak disertai dengan adanya teknik-teknik atau metoda pencegahan. Sehingga api tersebut tidak terkontrol dan meledak sehingga terjadilah kebakaran hutan yang sesungguhnya arah penjarannya tidak dapat lagi dikontrol oleh pembakar.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup><http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63134/5/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, di unduh Jum'at, 23 februari 2018, pukul 20:45 wib.

Menurut Sahardjo (2003) kebakaran hutan merupakan pembakaran yang penjarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati, *snags* atau pohon mati yang tetap berdiri, *logs*, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Menurut Syaufina (2008) kebakaran hutan merupakan suatu kejadian dimana api melahap bahan bakar yang bervegetasi, yang terjadi di dalam kawasan hutan yang kemudian menjalar bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Penyebab utama kebakaran hutan yang disebutkan adalah konversi ke penggunaan lahan lain (terutama pertanian), hama dan penyakit, *over* eksploitasi hasil hutan (kayu industri, kayu bakar), praktekpemanenan yang buruk, penggembalaan berlebih, polusi udara dan badai (FAO 2001). Kebakaran merupakan hal yang sering terjadi di Pulau



Kalimantan dan Sumatra, membakar areal dengan luas terbesar pada tahun 1986, 1991, 1994 dan 1997. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena El Nino tahun 1997/1998, kebakaran tak terkendali telah menghancurkan areal sangat luas dari hutan hujan dan semak belukar di Indonesia.<sup>42</sup>

## **2. Penyebab Pembakaran Hutan**

Setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam petir atau lava gunung berapi.

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (*land clearing*) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling murah, mudah

---

<sup>42</sup><http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63134/5/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, di unduh Jum'at, 23 februari 2018, pukul 20:45 wib.

dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.

Faktor cuaca juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kebakaran hutan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif. Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas waktu siang dan malam hari. Terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan. Masing- masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga. Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan sangat luas hingga menutupi beberapa wilayah di negara ASEAN, seperti

Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya jarak pandang (*visibility*), transportasi udara dan darat yang terganggu, meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan atas, dan masalah- masalah sosial ekonomi di masyarakat. Dampak asap akibat kebakaran menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup><http://repository.uinsuska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf>, di unduh Jum'at, 23 Februari 2018, pukul 21:15 wib

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA TALANG RIMBA**

**KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN**

**KOMERING ILIR (OKI)**

**A. Sejarah Singkat Desa Talang Rimba**

Latar belakang desa tersebut dinamakan Talang Rimba, berangkat dari sejarah yang di ungkapkan beberapa tokoh masyarakat dengan beberapa versi antara lain :

Menurut Jakfar, selaku pemangku adat. Dahulu desa ini disebut dusun Anyar yang artinya desa baru, dikarenakan awalnya penduduk masyarakat desa Talang Rimba belum bermukim ditempat yang sekarang, pada suatu hari ada seorang pemuda yang melihat di kejauhan, ada sebuah daratan yang didekat air, yang sangat kondusif jika dijadikan tempat bermukim, dan disampaikanlah kepada yang lain, hingga akhirnya mereka pindah ketempat tersebut yang dinamai dusun Anyar yang sekarang bernama Desa Talang Rimba.<sup>44</sup>

Menurut Irmunsyah (Kepala Dusun III) Desa Talang Rimba asal mulanya adalah hutan belantara yang pada waktu itu

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Jakfar Pemangku adat Desa Talang Rimba pada tanggal 3 Maret 2018

masyarakat dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan mencari kayu dihutan, lalu akhirnya beberapa masyarakat dari Simpang Tiga menetap disana dan lama-kelamaan banyak penduduk yang menetap lalu akhirnya jadilah Desa yang diberi nama Desa Talang Rimba.<sup>45</sup>

Ada juga yang mengatakan desa ini dahulunya merupakan bagian dari hutan rimba yang hanya dihuni oleh beberapa orang sambil berkebun pisang, ubi kayu, padi, sambil berburu binatang hutan, seperti rusa, kelinci, dan sebagainya. Lama kelamaan tempat ini dinamakan Desa Talang Rimba, karenan itu jika ada orang yang berasal dari Talang Rimba atau anak atau juga cucu dari seorang yang lahir didesa Talang Rimba bertemu dengan orang Talang Rimba maka dipaut pautkan akan adasilsilah keluarga diantara sesamanya.<sup>46</sup>

Pendapat lain menyatakan, bahwa Talang Rimba adalah terdiri dari dua suku kata, yaitu Talang yang artinya dataran rendah atau tanah sedangkan Rimba ialah hutan yang lebat, dahulunya Desa Talang Rimba ialah desa yang sangat ditakuti,

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan IrmunsyahKepala Dusun III Desa Talang Rimba pada tanggal 3 Maret 2018

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Syamsul Bahri tokoh masyarakat Desa Talang Rimba pada tanggal 5 Maret 2018

dikarenakan penduduk desa terkenal dengan keberaniannya, sopan santun yang harus dijaga, apalagi jika pendatang baru atau tamuyang ingin bertamu kerumah wanita atau pemuda, jika tidak sopan terhadap ahli rumah atau dengan masyarakat disekitarnya cuek tidak bertegur sapa, maka akan diusir secara paksa bahkan sampai disiksa, namun dibalik itu rasa saling menghargai menyayangi antar sesama tetap terjaga.<sup>47</sup>

Desa Talang Rimba adalah desa yang tertua dibandingkan dengan desa yang disekitarnya, bahkan ibukota Kecamatan Cengal adalah pecahan dari Desa Talang Rimba, seiring dengan perkembangan zaman jumlah penduduk bertambah banyak, maka jika dilihat sekarang tidak ada lagi hutan rimba yang lebat yang ada banyak pohon karet hampir setiap sudut yang dulunya hutan. Karena sekitar tahun 70 an kayu mulai ditebang, pabrik kayu mulai menjamur dimana mana, penebangan pohon liar pun tidak terbendung lagi karena pada saat itu jalur transportasi hanya dapat ditempuh lewat sungai, sekarang masyarakat Desa Talang Rimba

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Kadafi tokoh pemuda Desa Talang Rimba pada tanggal 3 Maret 2018

menyebar kemana mana dikarenakan sempitnya lahan untuk berkembang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>48</sup>

## **B. Letak Geografis Desa Talang Rimba**

Desa Talang Rimba merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ibu kota Kayu Agung. Letak Desa Talang Rimba dengan Kecamatan Cengal lebih kurang 5 (lima) Kilometer dengan ruas jalan yang menghubungkan ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten, menggunakan sarana darat dan dapat ditempuh dengan dua jalan, pertama jalan yang menuju Kecamatan Tulung Selapan masih jalan tanah, kedua jalan dari ibu kota Kecamatan Cengal sendiri dengan jalan berbatuan yang di campur aspal dan juga sebagian jalan tanah. Sedangkan transportasi laut hanya bisa ditempuh jika musim hujan atau jika air pasang dengan menggunakan *speed boat*. Luas wilayah Desa Talang Rimba Kurang lebih 21.800 Ha, yang dimanfaatkan dengan beberapa kegunaan diantaranya pemukiman penduduk, gedung sekolah, perkebunan karet dan lading tegalan untuk lebih lengkap dan rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Noversyah Kepala Desa Talang Rimba pada tanggal 2 Maret 2018

**TABEL I**  
**LUAS TANAH MENURUT KEGUNAANNYA DI DESA**  
**TALANG RIMBA**

No	Pemanfaatan tanah	Luas Tanah	Persentase (%)
1	Pemukiman Penduduk	1.850 Ha	0,08 %
2	Perkantoran Desa	0 Ha	0,00 %
3	Gedung Sekolah	1 Ha	0.01 %
4	Fasilitas Umum	0 Ha	0,00 %
5	Perkebunan	1.800 Ha	0,08 %
6	Hutan	0 Ha	0.00 %
7	Rawa	18.149 Ha	0,83 %
Jumlah		21.800 Ha	100 %

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal tahun 2018)

### **C. Keadaan Penduduk Desa Talang Rimba**

Masyarakat Desa Talang Rimba mempunyai azas kekeluargaan dan hidup secara kekeluargaan didalam bermasyarakat, suasana keseharian masyarakat Desa Talang Rimba hidup dengan rukun dan saling menghormati. Berdasarkan hasil sensus 2016 jumlah penduduk didaerah ini 3150 jiwa dengan klasifikasi 3150 jiwa, laki-laki 1570 jiwa dan 1580 jiwa perempuan, yaitu terdiri dari berbagai usia. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**TABEL II**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR**

No	Umur	Jumlah
1	1 Bulan Sampai 10 Tahun	405 Orang
2	11 Tahun Sampai 20 Tahun	368 Orang
3	21 Tahun Sampai 30 Tahun	331 Orang
4	31 Tahun Sampai 40 Tahun	662 Orang
5	41 Tahun Sampai 50 Tahun	558 Orang
6	51 Tahun Keatas	196 Orang
Jumlah		3150 Orang

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal tahun 2018)

**D. Mata Pencanharian Penduduk Desa Talang Rimba**

Masyarakat Desa Talang Rimba pada umumnya bekerja sebagai petani karet, sebagian petani sawah, buruh tani, pegawai negeri, pedagang, peternak, nelayan. Berikut pada tabel perincian mata pencaharian masyarakat Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal.

**TABEL III**

**Mata Pencanharian Penduduk Desa Talang Rimba**

No	Jenis Mata Pencanharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1570 Orang
2	Buruh Tani	21 Orang
3	Pegawai Negeri	10 Orang
4	Pedagang	34 Orang
5	Peternak	18 Orang
6	Nelayan	25 Orang
Jumlah		1678 Orang

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas diatas menunjukan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Talang Rimba mayoritas adalah petani karet. Dengan taraf hidup tani inilah masyarakat Desa Talang Rimba menghabiskan waktu mereka diperkebunan karet untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

## **E. Tingkat Pendidikan Dan Agama Penduduk**

### **1. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi perkembangan dan perubah tingkah laku, pendidikan juga memberikan pengetahuan, sikap, kepercayaan, serta keterampilan dan aspek kelakuan pada generasi masyarakat. Pendidikan adalah suatu proses belajar mengajar pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan masyarakat.

Peran pemerintah untuk mengurangi jumlah buta huruf di Desa Talang Rimba mulai proses itu dapat dilihat telah dibangunnya SDN 1 Talang Rimba, sedangkan Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah ada di ibu kota Kecamatan begitupun sekolah

menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP) hanya berada di ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh kurang lebih 5 kilo meter dari desa Talang Rimba.

Secara rinci penyebaran penduduk berdasarkan variabel pendidikan sebagai berikut : penyebaran ini dimulai dari yang tidak sekolah sampai yang tidak tamat sekolah sebanyak 2.108 orang, untuk yang belum sekolah 190, untuk yang tamat sekolah dasar 128 orang, untuk yang tamat sekolah menengah pertama sebanyak 84 orang, untuk yang tamat sekolah menengah atas 45 orang dan yang mampu ke perguruan tinggi 21 orang.

Dilihat dari kondisi ini, maka sarana pendidikan di desa Talang Rimba sangatlah kurang sekali menurut data yang diperoleh baik melalui observasi langsung ataupun informasi dari aparat pemerintahan desa Talang Rimba dapatlah diketahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

**TABEL IV**

**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum Sekolah	190
2	Usia 7-15 tahun tidak pernah sekolah	129
3	Pernah Sekolah SD tapi tidak tamat	2.108
4	Tamat SD / Sederajat	124
5	Tamat SLTP / Sederajat	84
6	Tamat SMA / Sederajat	45
7	D-1	4
8	D-2	2
9	D-3	8
10	S-1	7
Jumlah		2.477

(Sumber: Dokumentasi Profil desa Talang Rimba Kecamatan Cengal tahun 2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Talang Rimba secara umum mulai meningkat dan terus berproses walaupun sampai sekarang hanya 7 orang yang mengenyam pendidikan sampai S-1 dikarenakan

*paradigmamasyarakat jauh lebih cenderung untuk mencari uang dari pada kuliah yang banyak menghabiskan uang.*

Masyarakat desa Talang Rimba dari segi pendidikan dibandingkan masyarakat di kecamatan lain sungguh jauh tertinggal, salah satu faktor penyebab adalah faktor ekonomi. Masyarakat jauh lebih cenderung berpikir untuk bekerja dari pada sekolah karena sekolah tidak menjamin akan mendapatkan uang yang banyak malah hanya menghabiskan uang saja. Mereka berpendapat terkadang anak-anak mereka cukup sekolah sampai pada tingkat SLTP atau paling tinggi SLTA setelah tamat dari sana lebih baik mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dari pada sekolah sampai pada jenjang yang lebih tinggi tetapi masih saja sulit untuk mencari kerja. Padahal sekolah bukan hanya untuk mencari kerja saja tetapi untuk menambah ilmu dan pengalaman dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Faktor lingkungan sangat memberi pengaruh baik bagi kehidupan dikalangan pemuda tersebut, mereka bergaul dengan temannya yang tidak sekolah, ditambah lagi orang tua yang

kurang mampu mengarahkan anak-anaknya, secara otomatis anak-anaknya semakin malas untuk sekolah.

Dari beberapa faktor inilah sebagian besar menyebabkan tingkat pendidikan pada masyarakat desa Talang Rimba sedikit sekali yang sampai kejenjang perguruan tinggi, kesadaran tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan guna menghadapi dunia di era persaingan, ilmu yang akan membangun masyarakat itu sendiri, yang akan memberikan warna didalam kehidupan desa untuk menuju masyarakat yang lebih baik.

## 2. Agama Penduduk

Berdasarkan data yang dapat dihimpun dari aparat desa Talang Rimba dan penjelasan dari tokoh agama setempat serta observasi langsung, bahwa masyarakat desa Talang Rimba secara keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam secara turun temurun sejak nenek moyang mereka dahulu. Kondisi demikian memberikan peluang terhadap tumbuhnya beberapa aspek kehidupan masyarakat yang Islami dalam pola tingkah laku kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak berarti kehidupan masyarakat desa Talang Rimba pada umumnya terlepas sama sekali dari pengaruh-pengaruh budaya yang bersifat negatif.

Keberadaan agama Islam dalam kehidupan masyarakat desa Talang Rimba secara nyata telah memberi corak tersendiri, dimana unsur-unsur kehidupan nuansa Islami telah mewarnai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu bagi masyarakat desa Talang Rimba kondisi keagamaannya tidak jauh berbeda dengan masyarakat desa lainnya.

Namun demikian bukan berarti masyarakat desa Talang Rimba kecamatan Cengal kondisi keagamaannya sudah memadai, akan tetapi banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti pendidikan agama terhadap anak-anak dan remajanya hal ini terlihat dari kurangnya kegiatan-kegiatan Islami seperti pengajian pemuda dan anak-anak, juga dapat dilihat dari kurangnya madrasah-madrasah.

Untuk itu perangkat desa dan pemuka agama mulai menghidupkan suasana masjid satu-satunya dengan menggalakan sholat 5 waktu dimasjid dan sedang memperbesar masjid biar lebih memberikan kenyamanan dan khusu'an dalam beribadah. Desa yang seluas 21.800 Ha dan 3150 jiwa seluruh masyarakat hanya mempunyai satu masjid yang sedang dalam masa pengrehapan sebagai prasarana peribadatan, dengan sarana

ibadah yang sangat minim tersebut kehidupan masyarakat dalam melaksanakan ibadah sedikit mendapatkan kesulitan selain itu mulai berkurangnya solidaritas antara sesama masyarakat.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan.**

Dari penelitian dilapangan, terjadinya tindak pidana pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Anggota BPD, Petani Karet, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, faktor-faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan disebabkan oleh beberapa faktor :

##### **1. Faktor Ekonomi**

Keadaan ekonomi yang sangat rendah, para pelaku pembakaran hutan melakukan pembakaran hutan guna membuka lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Menurut Firdinansyah selaku anggota BPD Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI ketika

diwawancarai pada tanggal 24 Februari 2018 mengatakan bahwa, perbuatan membakar hutan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat selama ini adalah karena terpaksa mereka harus melakukannya dengan cara membakar pohon-pohonan yang sudah mereka tebang karena dengan cara itu lebih mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk membuka lahan perkebunan.<sup>49</sup>

Sama hal apa yang disampaikan oleh Dedi Irawan, Kasmir, Gandi dan Kemerun selaku petani karet Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI yang merupakan pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan dibakar ketika diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2018 mengatakan bahwa, membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar adalah merupakan hal yang sangat mudah dilakukan serta tidak banyak mengeluarkan biaya, prosesnya cepat, tanah yang terbakar menjadi subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik itu pohon karet, padi dan sayur-sayuran. Karena hal itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Talang Rimba sejak dari dulu pada saat membuka lahan perkebunan pada

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Firdinansyah, anggota BPD Desa Talang Rimba pada tanggal 24 Februari 2018

musim kemarau. Tetapi akhir-akhir mereka kesulitan untuk membuka lahan perkebunan karena banyak peraturan perundang-undangan yang melarang membuka lahan perkebunan dengan dibakar.<sup>50</sup>

Jika dilihat permasalahan ini tentu kita sudah tahu bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, menurut Noversyah selaku Kepala Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal ketika diwawancarai pada tanggal 2 Maret 2018 mengatakan bahwa, dengan adanya peraturan-peraturan tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar, baik itu peraturan daerah maupun pusat. Masyarakat banyak belum bisa menerima tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar, sehingga sekarang apabila masyarakat ingin membuka lahan perkebunan menggunakan cara yang banyak menguras tenaga dan biaya untuk membersihkan lahan dari semak-semak dan pohon-pohon yang ditebang, karena selama ini masyarakat membuka lahan perkebunan selalu membakar hutan karena menurut masyarakat cara seperti itu merupakan hal yang

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Dedi Irawan, Kasmir, Gandi dan Kemerun selaku petani karet Desa pada tanggal 27 Februari 2018

mudah serta tidak banyak mengeluarkan biaya serta tanah perkebunan menjadi subur sehingga tanaman yang akan ditanam tumbuh dengan subur.<sup>51</sup>

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Jika pembukaan lahan dilakukan lahan hutan yang masih banyak pohon-pohon besar, maka pembukaan lahan perlu dilakukan dengan menggunakan alat berat. Dalam teknik penumbangan pohon biasanya jika dalam skala besar semua pohon dipotong dengan mesin lalu ditumbangkan satu persatu. Menurut Gotot Holden, Hamdin, Jilawani dan Beni Unandar selaku perangkat Desa Talang Rimba ketika diwawancarai pada tanggal 5 Maret 2018 mengatakan bahwa, masyarakat Desa Talang Rimba mata pencahariannya adalah mayoritas petani karet dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, untuk itu seharusnya Pemerintah Kabupaten OKI atau Pemerintahan Pusat. Dalam hal melarang masyarakat membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar seharusnya ada kebijakan atau solusi yang berupa sarana dan prasarana, seperti disediakannya alat berat

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Noversyah Kepala Desa Talang Rimba pada tanggal 2 Maret 2018

yang berjenis excavator dan atau bulldoser untuk mempermudah masyarakat dalam membuka lahan perkebunan tanpa dibakar.<sup>52</sup>

Selama peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang berada dan menetap di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, sikap masyarakat Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Berikut adalah sejumlah sikap informan terhadap penerapan sanksi pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Antara lain :

Lendri, Bobi, Asra, Syamsudin, Nudin dan Bambang selaku tokoh masyarakat Desa Talang Rimba ketika diwawancarai pada tanggal 4 Maret 2018 mengatakan kita tidak bisa berbuat banyak, dikarenakan keterbatasan kemampuan walaupun sebenarnya pembakaran hutan tersebut merusak lingkungan dan pencemaran udara karena asap dari pembakaran hutan, dan kita juga harus taat

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Gotot Holden, Hamdin, Jilawani dan Beni Unandar, selaku perangkat Desa Talang Rimba pada tanggal 5 Maret 2018

dan patuh atas segala peraturan yang diterapkan oleh pemerintah sekarang.<sup>53</sup>

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan.<sup>54</sup> Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam Undang-

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Lendri, Bobi, Asra, Syamsudin, Nudin dan Bambang, selaku tokoh masyarakat Desa Talang Rimba pada tanggal 4 Maret 2018

<sup>54</sup><https://media.neliti.com/media/publications/148549-ID-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-pelaku.pdf>, di unduh Kamis, 12 April 2018, pukul 11:45 WIB.

Undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :<sup>55</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-Undang. Sebab dalam Undang-Undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan.

Sanksi tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>55</sup>Pasal 119 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) Huruf H yang berbunyi :

*"Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".*<sup>56</sup>

Pasal 108 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*"Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".*<sup>57</sup>

Ini berarti pemberian sanksi hukuman bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berupa pidana penjara dan denda.

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut :

---

<sup>56</sup> Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>57</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”<sup>58</sup>*

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja . makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan tapi juga mencakup korporasi.

Pasal 98 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

*“Jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan*

---

<sup>58</sup> Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)“.*<sup>59</sup>

Esensi pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp. 4. 000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

---

<sup>59</sup> Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan paling banyak Rp. 12. 000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana jugadiperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12. 000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya, baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

*“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.*

*000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)“<sup>60</sup>.*

Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) diatas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (1). Rumusan delik dalam pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat atau serius dibandingkan dengan pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00

---

<sup>60</sup> Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(satu miliar rupiah) dan paling banya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan palin banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang

berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>61</sup> Berikut adalah beberapa sarana penegakan hukum lingkungan: Pertama, sarana Penegakan Hukum Administrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat empat jenis sanksi hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Ayat (2) yaitu: Sanksi administrasi terdiri atas:<sup>62</sup>

1. *Teguran tertulis*
2. *Paksaan pemerintah*
3. *Pembekuan izin lingkungan dan*
4. *Pencabutan izin lingkungan.*

Kedua, sarana penegakan Hukum Perdata. Instrumen hukum perdata dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa lingkungan yang bersumber dari adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni: jalur pengadilan (*in court* atau litigasi), dan diluar jalur pengadilan (*out court settlement*) atau biasa dikenal dengan Alternatif

---

<sup>61</sup> Siti Sundari Rangkuti, 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 190

<sup>62</sup> Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

a. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.<sup>63</sup> Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. *Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*
2. *Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan*

---

<sup>63</sup> Akib Muhammad, 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 47

<sup>64</sup> Erwin Muhamad, 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 167-168

*tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.*

3. *Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.*
4. *Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

b. Jalur di luar Pengadilan

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 menyebutkan :<sup>65</sup>

1. *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai*
  - a. *Bentuk dan besarnya ganti rugi,*
  - b. *Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan,*
  - c. *Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan, dan atau*
  - d. *Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.*
2. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
3. *Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.*

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga nonpengadilan yang diatur dalam hukum formal seperti tersebut di atas terlampaui prosedural, dan menyulitkan keadaan dan

---

<sup>65</sup>Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



aktivitas LSM dan organisasi lingkungan yang akan menjadi mediator, karena dibebani persyaratan yang teramat ketat dan terkesan mengada-ada. Karena itu, dalam praktek seringkali disimpangkan.<sup>66</sup>

Ketiga, sarana penegakan Hukum Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 120. Sedangkan untuk kebakaran hutan ketentuan pidana ada pada Pasal 108 yang menyebutkan :

*"Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".<sup>67</sup>*

Fungsi hukum pidana dinilai oleh pakar hukum sebagai instrumen penegak hukum paling akhir (ultimum remedium),

---

<sup>66</sup>Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 150-152

<sup>67</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana melindungi lingkungan.<sup>68</sup>

### **C. Sanksi Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)**

Sanksi pidana tidak berlaku surut jika terjadi suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan masyarakat, secara teoritis ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Akan secara praktis sesuai dengan realita yang terjadi saat ini terkhusus di negara kita masih belum secara maksimal memakai ajaran hukum Islam meskipun kenyataannya penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan telah diatur semua bentuk pelanggaran maupun kejahatan, baik pelaku yang dilakukan perorangan maupun suatu badan baik itu dengan upaya pencegahan preventif dalam hal ini hukum tergantung pada keperluan dan jenis pelanggaran yang dilakukan.<sup>69</sup>

*Al-Qur'an* dan *al-Hadits* merupakan sumber hukum yang lebih diutamakan dalam mengambil keputusan masalah hukum.

---

<sup>68</sup> Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*: Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 300

<sup>69</sup> Prodjodikoro Wirjono, 2009. *Asas-asas hukum pidana indonesia*, bandung: PT Refika Aditama, Hlm 147.

Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan dalam sanksinya oleh *Al-Qur'an* maupun *al-Hadits* disebut sebagai tindak pidana *ta'zir*. Misalnya tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu dan suap. Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil Amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan dalam *syari'at*, Seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup dan memberi sanksi-sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.<sup>70</sup>

Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur kejahatan dapat dibagi dua yaitu unsur-unsur dasar dan unsur-unsur khusus :

Unsur-unsur dasar meliputi :<sup>71</sup>

1. Unsur hukum (*al-rukn al-syar'i*), yaitu kejahatan yang sudah jelas melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atas ketentuan-ketentuan *syari'ah*.
2. Unsur materil (*al-rukn al-madi*), yaitu berupa perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*), unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (kebebasan berbuat).

---

<sup>70</sup> Hanafi Ahmad, 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, Hlm 90.

<sup>71</sup> Djazuli, 2002. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Wali Hutan, Hlm. 53

Setiap negara akan memberikan aturan yang terbaik agar warga negara mereka dapat hidup dengan teratur dan berusaha untuk melindungi negaranya dari ancaman tindak kejahatan yang dapat merugikan negaranya maka dibentuklah suatu hukum, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan baik itu bersifat materil maupun formil.

Unsur-unsur khusus meliputi :

Unsur khusus pada kejahatan ini berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan ini menurut Hanafih, jika dilihat dari jenis hukumannya tindak pidana dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :<sup>72</sup>

- a. Kejahatan *hudud*, kejahatan terhadap kepentingan publik dimana hukuman ini ditentukan sebagai hak Allah baik kualitas, maupun kuantitasnya ditentukan dan tidak mengenai tingkatan, dan hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan perorangan maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum, seperti memelihara ketentramandan keamanan masyarakat. *Jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qodzab*), minum-minuman keras, mencuri, merampok (*Hirabah*), murtad dan pembontakan (*al-baghyu*).
- b. Kejahatan *Qisas* atau *Diyat*, yaitu kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia baik itu penganiayaan atau pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau karena kesalahan.

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 65.

- c. Kejahatan *Ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak termasuk pada kejahatan *hudud* dan yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat-syarat. Kejahatan *ta'zir* adalah merupakan semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, finansial, atau norma bagi individu maupun masyarakat dalam mengambil keputusan hukum berdasarkan keputusan penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syara' dan prinsip-prinsip hukum umum. *Ta'zir* sering disamakan oleh *fuqoha* dengan hukuman maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarah*, dalam sebuah kaidah "*ta'zir* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan".

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian yaitu:<sup>73</sup>

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya : membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, pembontakan dan tidak taat kepada *Ulil Amri*.
2. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan, yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba Allah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia.

Perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Surat Al-

---

<sup>73</sup> Dzajuli. 2006. *Kaidah-kaidah fiqih*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, Hlm 166.

Qashash (28) ayat 77 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan.

Allah SWT berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۙ ۷۷

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”.(Q.S Al-Qashash [28]:77)<sup>74</sup>

Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi dipermukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.

Allah SWT berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۙ ٤١

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)

---

<sup>74</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014. Hal : 395

*perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum [30]:41)<sup>75</sup>*

Didalam Islam, Al- Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Araf [7]: 56)<sup>76</sup>

Perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai tindak pidana *jarimah* karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana *jarimah*. Di dalam Hukum Pidana Islam *Fiqh Jinayah* suatu perbuatan tindak pidana *jarimah* terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.

---

<sup>75</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014. Hal : 409

<sup>76</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014. Hal : 158

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam *Al-Qur'an* maupun *al-Hadis*, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis, seperti yang telah diuraikan diatas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'* akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam *Al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada dua faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan yang terjadi di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI yaitu:

- **Faktor Ekonomi**

Keadaan ekonomi yang sangat rendah, para petani karet terpaksa untuk membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan karena dari sejak zaman dahulu mereka membuka lahan selalu dengan cara membakar hutan sebelum adanya peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa dengan cara membakar hutan untuk membuka lahan tidak banyak mengeluarkan tenaga serta biaya yang sangat kecil dan juga prosesnya cepat.

- **Faktor Sarana dan Prasarana**

Dalam hal melarang masyarakat membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar seharusnya ada kebijakan atau solusi yang berupa sarana dan prasarana, seperti disediakannya alat berat yang berjenis excavator, bulldozer dan fasilitas lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam membuka lahan perkebunan tanpa dibakar.

2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Telah ditentukan dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf H yang isinya tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dan diperjelas dalam Pasal 108.

*“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memadai akan tetapi penegakan hukum oleh dinas atau aparat penegak hukumnya belum berjalan secara optimal dan komprehensif.

3. Sanksi bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan didalam hukum Islam perbuatan merusak lingkungan dengan cara membakar hutan adalah sesuatu yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi hukuman bagi pelakunya yaitu *jarimah tak'zir* karena perbuatan membakar hutan meskipun tidak secara eksplisit diatur didalam *Al-Qur'an* maupun *al-Hadis* akan tetapi perbuatan tersebut jelas dilarang oleh *syara'*. Mengenai bentuk hukuman sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (*ulil amri*). Hakim diberikan kewenangan dalam memvonis atau pun menentukan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pembakaran hutan. Hakim juga dapat berpegang pada prinsip kemaslahatan umat.

## **B. SARAN-SARAN**

Sebagaimana permasalahan diatas, maka penulis memberikan beberapa hal yang harus yang harus dilakukan secara khusus oleh pemerintah atau penegak hukum dan umumnya untuk masyarakat.

1. Bagi seluruh elemen masyarakat, diharapkan memberikan pemahaman sejak dini arti pentingnya mencintai lingkungan kepada sesama masyarakat dalam membuka lahan perkebunan, serta memberikan pemahaman bahwa alam dan seisinya diciptakan Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia.
2. Tindak pidana pembukaan lahan perkebunan sudah diatur dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam, maka kepada aparat pemerintah atau penegak hukum kiranya dapat memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Karena pelakunya pembakaran hutan adalah petani-petani peladang, maka pemerintah seyogyanya memberikan himbauan, penyuluhan, dan kontrol sosial kepada mereka agar tidak lagi mengulangi perbuatan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014.

### **Buku-Buku :**

Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup*: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Akib Muhammad, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali, Zainuddin, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dzajuli, 2006. *Kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.

Erdiansyah, 2014. "*Implementasi Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau*", Fakultas Hukum Universitas Riau.

Erwin Muhamad, 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hanafi Ahmad, 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Midas Surya Grafindo

Mkuslich, Wardi. 2007, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media.

- Muhammad Ipo, 2014 "*Kendala Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Hutan*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mujib. 2008, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta. Kalam Mulia.
- Nandika Dodi, 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Prodjodikoro Wirjono, 2009. *Asas-asas hukum pidana indonesia*, bandung: PT Refika Aditama.
- Santoso Urip, 2012, *hukum agraria kajian komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siti Sundari Rangkuti, 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbita Fakultas Psikologi UGM.
- Siti Sundari Rangkuti, 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Syaifuddin Azwar, 1990. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tri Andrisman, 2009.*Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.

Winarno, 2008.*Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta : Bumi Aksara.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

## **C. Pustaka Elektronik :**

<http://kalsel.muhammadiyah.org>

[http://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/outlook2017\\_edit\\_1.pdf](http://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/outlook2017_edit_1.pdf)

<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%20208208241006.pdf>

<http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/2/pembukaanlahanlandclearingdan.html>

<https://budidayatanamanperkebunan.blogspot.com/2014/8/mengenaltanamanperkebunan.html>

<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63134/5/BA%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

<http://repository.uinsuska.ac.id/2594/3/BA%20II.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/148549IDpenerapansanksipidana-terhadap-pelaku.pdf>.

Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Bayu Cuan  
Nim : 14160013  
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Rimba, 23 Agustus 1994  
Alamat Rumah : Dusun II RT 002 RW 006 Desa  
Talang Rimba Kecamatan Cengal  
Kabupaten OKI  
No. HP/WA : 0878118888991

### **B. Nama Orang Tua Kandung**

Ayah : Jakfar Semaji  
Ibu : Cikmumbai

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **D. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 1 Talang Rimba, Lulus Pada Tahun 2007
2. SMPN 1 Cengal, Lulus Pada Tahun 2010
3. SMAN 1 Cengal, Lulus Pada Tahun 2013
4. UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam), Lulus Pada Tahun  
2018

### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
2. Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum
3. Aliasnsi Mahasiswa Pantai Timur (AMPATI)
4. Masika ICMI (Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan  
Muslim Indonesia)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 280 /Un.09/PP.01/02/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 12 Februari 2018

Kepada Yth.  
Kepala Desa Talang Rimba  
Kec. Cengal Kab OKI.

Di  
Tempat.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Bayu Cuan/ 14160013  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara di Bakar Menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.  
FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
19571210 1986031 004.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
  2. Mahasiswa yang bersangkutan .
  3. Arsip.

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Pikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website : [www.syarlah.radenfatah.ac.id](http://www.syarlah.radenfatah.ac.id)





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KECAMATAN CENGAL  
**DESA TALANG RIMBA**  
Jl. Raya Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kab. OKI

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / 113 / Ds.TR / III / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Bayu Cuan  
Nim : 14160013  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan  
Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor  
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (*Study Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan  
Cengal Kabupaten OKI*)

Sepengetahuan kami yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka untuk  
memperlancar penulisan Skripsi di Desa Talang Rimba.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi syarat untuk  
penyusunan Skripsi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai  
mana mestinya.

Talang Rimba,      Maret 2018  
Mengetahui,  
KEPALA DESA  
  
**NEVERSYAH**



# **DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN**

No	Nama	Pekerjaan
1	Jakfar	Pemangku Adat
2	Irmunsyah	Kepala Dusun II
3	Firdinansyah	Anggota BPD
4	Dedi Irawan	Petani Karet
5	Kasmir	Petani Karet
6	Gandi	Petani Karet
7	Kemerun	Petani Karet
8	Noversyah	Kepala Desa
9	Gotot Holden	Perangkat Desa
10	Hamdin	Perangkat Desa
11	Jilawani	Perangkat Desa
12	Beni Unandar	Perangkat Desa
13	Lendri	Tokoh Masyarakat
14	Bobi	Tokoh Masyarakat
15	Asra	Tokoh Masyarakat
16	Syamsudin	Tokoh Masyarakat
17	Nudin	Tokoh Masyarakat
18	Bambang	Tokoh Masyarakat







**Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Masyarakat Desa Talang Rimba**  
**Kecamatan Cengal Kabupaten OKI**

1. Bagaimana caranya membuka lahan perkebunan yang biasa dilakukan di daerah Desa Talang Rimba ?
2. Faktor apa sajakah yang mendorong melakukan pembukaan lahan harus dengan cara membakar hutan ?
3. Bagaimana dampak fositif dan negatif membuka lahan perkebunan harus dengan cara dibakar ?
4. Pada saat kapan biasanya petani perkebunan membuka lahan perkebunan baru untuk di tananmai tanam yang baru ?
5. Bagaimana tanggapannya dengan adanya Undang-Undang serta aturan yang melarang membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar baik dari pusat maupun daerah terkait larangan tersebut ?
6. Adakah saran terhadap pemerintah baik pemerintahan pusat maupun daerah tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar?
7. Apakah ada program atau kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat atau petani tentang solusi atau cara membuka lahan perkebunan tanpa membakar hutan ?

# LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI











NAMA : BAYU CUAN  
 NIM : 14160013  
 JURUSAN : JINAYAH  
 FAKULTAS : Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kab. OKI)

PEMBIMBING I : YUSWALINA, SH, MH.  
 NIP. : 19680113 199403 2 003

No	HARI/TGL	HAL YANG DI KONSULTASIKAN	PARAF
1.	Jumat, 16 Feb 2018	Perbaikan Bab I	
2.	Kamis, 1 Maret 2018	Acc Bab I dan Bab II	
3.	Kamis, 29 Maret 2018	Perbaikan Bab III	
4.	Selasa, 3 April 2018	Acc Bab III lanjut Bab IV dan V	
5.	Senin, 23 April 2018	Perbaikan VI dan Bab VII	
6.	Jumat, 24 Mei 2018	Acc Bab IV dan Bab V. Skripsi siap untuk diujikan.	

# LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : BAYU CUAN  
 NIM : 14160013  
 JURUSAN : JINAYAH  
 FAKULTAS : Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kab. OKI)  
 PEMBIMBING II : JUMANAH, SH, MH.  
 NIP. : 19691031 201411 2 001

No	HARI/TGL	HAL YANG DI KONSULTASIKAN	PARAF
1	Selasa, 30 Januari 2018	Perbaikan judul dan metode penulisan	
2	Pada, 14 Februari 2018	Acc BAB I, lanjut BAB II	
3	Selasa, 19 Februari 2018	Perbaikan BAB II, Catatan kaki dan Pemasukan literatur	
4	Selasa, 27 Februari 2018	Acc BAB II, lanjut BAB III	
5	Selasa, 6 Maret 2018	Perbaikan BAB III	
6	Senin, 19 Maret 2018	Acc BAB III lanjut BAB IV	
7	Selasa, 3 April 2018	Perbaikan BAB IV;	
8	Senin, 9 April 2018	Perbaikan tambahan bahan	
9	Jumat, 13 April 2018	Acc BAB IV, lanjut BAB V	
10	Selasa, 17 April 2018	Perbaikan BAB V dan penulisan keseluruhan skripsi	
11	Ramis, 26 April 2018	Acc. Penghidangan untuk Ujian Munasabah  Acc. Layar untuk Diseminasi. Lanjutan Ex pembimbing II	